

# **MATRIK PERBANDINGAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK.07  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 105/PMK.07 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH**

**UJDIH BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**2021**

No.	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK. 07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK. 07/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK. 07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	KETERANGAN
1.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15B ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. Bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan</p>	

		huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;	
3	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</li> </ol>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>

	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID19)</i> dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);</p>	<p><b>Penambahan Penjelasan</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	---	--	---

	6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);	6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);	<b>TETAP</b>  <b>Penambahan Penjelasan yaitu angka 7</b>
<b>4</b>	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
<b>5</b>	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH.	
<b>6</b>	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>Pasal I</b>	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita	

		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan angka 5 dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</li> </ol>	
7	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.</li> <li>4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.</li> <li>4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>

	<p>aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	<p>5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	<p><b>Penambahan Penjelasan</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	---	---	---

	<p>8. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.</p> <p>9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.</p> <p>10. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.</p>	<p>8. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.</p> <p>9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.</p> <p>10. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	--	---	---

	<p>11. Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>13. Paket Kebijakan adalah dokumen yang berisi program dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan Pinjaman Program.</p> <p>14. Perjanjian Pengelolaan Pinjaman adalah perjanjian atau nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah dan PT SMI.</p>	<p>11. Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>13. Paket Kebijakan adalah dokumen yang berisi program dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan Pinjaman Program yang berkaitan dengan percepatan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada aspek kesehatan, sosial, dan/atau percepatan pemulihan perekonomian di Daerah.</p> <p>14. Perjanjian Pengelolaan Pinjaman adalah perjanjian atau nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah dan PT SMI.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>Penambahan penjelasan</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	---	---	---

	<p>15. Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN Daerah.</p> <p>16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/lembaga.</p> <p>17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.</p> <p>18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.</p> <p>19. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan</p>	<p>15. Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN Daerah.</p> <p>16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/lembaga.</p> <p>17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.</p> <p>18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.</p> <p>19. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	---	--	---

	<p>pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.</p> <p>20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.</p> <p>21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.</p> <p>23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar</p>	<p>20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.</p> <p>21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN /PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.</p> <p>23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	---	---	---

	<p>seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.</p> <p>24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>25. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap bunga pinjaman yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN.</p>	<p>24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>25. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap bunga pinjaman yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
<b>8</b>	<b>BAB II RUANG LINGKUP</b>		
	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.</p>	<p><b>TETAP</b></p>

	<p>(2) Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;</li> <li>b. dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;</li> <li>c. jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;</li> <li>d. tingkat suku bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun;</li> <li>e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>f. biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan atas tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tingkat suku bunga tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p>	<p>(2) Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;</li> <li>b. dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;</li> <li>c. kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>d. jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;</li> <li>e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>f. biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.</li> </ol> <p>(3) Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan</li> <li>b. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan</li> </ol>	<p><b>Perubahan : pada ayat (2) penambahan satu klausul, yaitu huruf</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> </ol> <p><b>Perubahan pada klausul</b> jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun menjadi 8 (delapan) tahun</p> <p><b>Perubahan : menyeluruh pada ayat (3)</b></p>
--	--	---	--

	<p>(4) Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PT SMI dapat memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.</p> <p>(5) Terhadap pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Subsidi Bunga.</p>	<p>tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PT SMI dapat memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.</p> <p>(5) Terhadap pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Subsidi Bunga.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pengelolaan atas Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).</p>	<p>3. Setelah ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pengelolaan atas Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).</p>	<p><b>TETAP</b></p>

	<p>(2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>b. menetapkan jangka waktu dan masa tenggang Pinjaman PEN Daerah untuk masing-masing Daerah;</li> <li>c. <b>menilai dan menetapkan</b> besaran pencairan dana Pinjaman PEN Daerah untuk dilakukan pengelolaan oleh PT SMI; dan</li> <li>d. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai perubahan besaran Subsidi Bunga terkait dengan Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.</li> </ol> <p>(3) <b>Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.</b></p>	<p>(2) Dalam melaksanakan dimaksud pada ayat pengelolaan sebagaimana (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>b. menetapkan jangka waktu dan masa tenggang Pinjaman PEN Daerah untuk masing-masing Daerah;</li> <li>c. <b>menelaah</b> besaran pencairan dana Pinjaman PEN Daerah untuk dilakukan pengelolaan oleh PT SMI; dan</li> <li>d. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai perubahan besaran Subsidi Bunga terkait dengan Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.</li> </ol> <p>(3) <b>Kebijakan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.</b></p>	<p><b>Perubahan :</b>  <b>pada ayat 2 huruf c</b>  <b>merubah kalimat menilai dan menetapkan</b> menjadi <b>menelaah</b></p> <p><b>Perubahan pada ayat 3</b></p>
	<p>Pasal 4  Untuk mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/ atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, Pemerintah</p>		<p><b>TETAP</b></p>

	<p>Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merupakan Daerah terdampak pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>;</li> <li>b. memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;</li> <li>c. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan</li> <li>d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima).</li> </ol>		
	BAB III PINJAMAN PEN DAERAH		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu PPA BUN dan KPA BUN Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah</p>		
	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan Pinjaman PEN Daerah, Menteri Keuangan selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) untuk Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>b. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN</li> </ol>		<b>TETAP</b>

	<p>Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjarrian PEN Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah.</p> <p>(3) PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Penggantian KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>(5) KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPSPM.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	---	--	---

	(6) PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dan KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		<b>TETAP</b>
	Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran		
	<p>Pasal 6</p> <p>(1) KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyusun dan mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dengan dilengkapi dokumen pendukung.</p> <p>(2) Pada awal tahun anggaran berjalan, PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.</p> <p>(3) Dalam rangka penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dapat berkoordinasi dengan KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>

	<p>Pinjaman PEN Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.</p> <p>(4) PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dengan memperhatikan Prakiraan Maju, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dan aspek lainnya.</p> <p>(5) Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan postur <i>resource envelope</i> dan Pagu Indikatif BUN.</p> <p>(6) Dalam hal alokasi pagu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemberian Pinjaman PEN Daerah, PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dapat mengusulkan tambahan pagu kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Bagian Ketiga Perjanjian Pengelolaan Pinjaman</p>		
	<p>Pasal 7 (1) Dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan</p>		<p><b>TETAP</b></p>

	<p>Keuangan atas nama Menteri Keuangan bersama Direktur Utama PT SMI menandatangani Perjanjian Pengelolaan Pinjaman.</p> <p>(2) Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tujuan dan pemberian kuasa pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</li><li>b. hak dan kewajiban para pihak;</li><li>c. jumlah dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</li><li>d. jangka waktu pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</li><li>e. tingkat suku bunga penyaluran Pinjaman PEN Daerah;</li><li>f. biaya pengelolaan penyaluran Pinjaman PEN Daerah yang akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah;</li><li>g. biaya provisi yang akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah;</li><li>h. tahapan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</li><li>i. penyampaian laporan pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</li><li>j. mekanisme pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</li><li>k. perubahan perjanjian; dan</li><li>l. penyelesaian sengketa.</li></ul>		<b>TETAP</b>
--	---	--	--------------



	<p>dalam Pasal 4, dapat menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah; atau</p> <p>b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Direktur Utama PT SMI dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), menyusun dokumen:</p> <p>a. Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/ atau</p> <p>b. Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan yang dikoordinasikan dengan PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	--	--	---



	<p>dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. besa.ran Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>b. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>c. penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. besaran Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>b. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>c. penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah.</li> </ol> <p>(1a) Pengajuan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020, diterima paling lambat minggu terakhir bulan November 2020; dan</li> <li>b. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya, diterima paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun berkenaan.</li> </ol>	<p><b>Penambahan 1 ayat yaitu ayat 1a</b></p> <p>(1a) Pengajuan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020, diterima paling lambat minggu terakhir bulan November 2020; dan</li> <li>b. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya, diterima paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun berkenaan.</li> </ol>
--	---	---	--

	<p>(2) Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;</li> <li>b. surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).</li> </ol> <p>(3) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas permohonan Pinjaman PEN Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dalam hal program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilampiri</p>	<p>(2) Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;</li> <li>b. surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).</li> </ol> <p>(3) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas permohonan Pinjaman PEN Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dalam hal program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilampiri dengan surat</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	--	---	---

	<p>dengan surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(5) Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.</p> <p>(6) Salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Utama PT SMI sebagai kelengkapan dokumen permohonan Pinjaman PEN Daerah.</p>	<p>permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(5) Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.</p> <p>(6) Salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Utama PT SMI sebagai kelengkapan dokumen permohonan Pinjaman PEN Daerah.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menilai kesesuaian permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan kebijakan Pinjaman PEN Daerah dan ketentuan mengenai defisit APBD.</p>		<p><b>TETAP</b></p>

	<p>(2) Dalam hal program dan/ atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menelaah surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).</p> <p>(3) Penilaian permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penelaahan permohonan izin pelampauan defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.</p> <p>(4) Dalam hal hasil penilaian permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pelampauan defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT SMI.</p> <p>(5) Dalam hal hasil penilaian permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	--	--	---



	<p>(4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PT SMI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah pokok pinjaman;</li> <li>b. jangka waktu pinjaman;</li> <li>c. masa tenggang pinjaman;</li> <li>d. tingkat suku bunga pinjaman; dan</li> <li>e. Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan yang telah disepakati.</li> </ol>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Bagian Kelima Perjanjian Pinjaman PEN Daerah</p>		
	<p>Pasal 13 (1) Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) disetujui, pemberian Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman.</p>	<p>5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13 (1) Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) disetujui, pemberian Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman.</p>	<p><b>TETAP</b></p>

	<p>(2) Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak disetujui, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI.</p> <p>(3) Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah.</p> <p>(4) Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>b. hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>c. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>d. masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>e. syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>f. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>g. tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>h. jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>i. kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer</li> </ol>	<p>(2) Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak disetujui, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI.</p> <p>(3) Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI bersama Kepala Daerah.</p> <p>(4) Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>b. hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>c. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>d. masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>e. syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>f. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>g. tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>h. jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;</li> <li>i. kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;</li> </ol>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	--	---	---

	<p>Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;</p> <p>j. biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</p> <p>k. biaya provisi;</p> <p>l. ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;</p> <p>m. perubahan perjanjian; dan</p> <p>n. penyelesaian sengketa.</p> <p>(5) Biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.</p> <p>(6) Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dibayarkan satu kali oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.</p> <p>(7) Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/atau</p> <p>b. kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.</p>	<p>j. biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;</p> <p>k. biaya provisi;</p> <p>l. ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;</p> <p>m. perubahan perjanjian; dan</p> <p>n. penyelesaian sengketa.</p> <p>(5) Biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.</p> <p>(6) Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dibayarkan satu kali oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.</p> <p>(7) Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/atau</p> <p>b. kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Bagian Keenam Pencairan Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah</p>		
		<p>6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	

	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PT SMI mengajukan surat permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah disertai dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian terhadap surat permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) PT SMI mengajukan surat permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. salinan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman;</li> <li>b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PT SMI;</li> <li>c. berita acara pencairan dana; dan</li> <li>d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman.</li> </ol>	<p><b>Perubahan :</b>  <b>Pada ayat 1 penyerderhanaan klausul menjadi</b>  PT SMI mengajukan surat permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p><b>Perubahan :</b>  <b>Pada ayat 2 penambahan klausul huruf a-d</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. salinan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman;</li> <li>b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PT SMI;</li> <li>c. berita acara pencairan dana; dan</li> <li>d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman</li> </ol>
--	--	---	--

	<p>(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah.</p> <p>(4) Berdasarkan surat permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM.</p> <p>(5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>(6) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pengujian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D.</p> <p>(7) Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran bendahara umum</p>	<p>(3) KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah melakukan penelaahan terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM.</p> <p>(5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>(6) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pengujian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D.</p> <p>(7) Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian</p>	<p><b>Perubahn menyeluruh pada ayat 3</b></p> <p><b>Penambahan penjelasan</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	--	---	---

	<p>negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p>	<p>anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>(8) Pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke rekening PT SMI.</p> <p>(9) Pencairan dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman.</p>	<p><b>Penambahan ayat 8 dan ayat 9</b></p>
		<p>7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 14A</b></p> <p>(1) Dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditempatkan dalam rekening khusus yang dibentuk PT SMI untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.</p> <p>(2) Hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT SMI ke RKUN pada setiap triwulanan.</p> <p>(3) Hasil setoran PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada rekening khusus yang</p>	<p><b>Penambahan ayat 14A</b></p>

		<p>dibentuk PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan/ atau</li> <li>b. tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman,</li> </ol> <p>PT SMI menyetorkan sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dimaksud ke RKUN pada akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>Pasal 15</p> <p>(1) PT SMI melakukan pemindahbukuan dari rekening PT SMI ke RKUD Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p>(2) Dalam rangka menjaga arus kas pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI pada akhir tahun, pemindahbukuan dana Pinjaman PEN Daerah dari rekening PT SMI ke RKUD sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15</p> <p>PT SMI melakukan pemindahbukuan atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari rekening PT SMI ke RKUD penerima Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman.</p>	<p><b>Perubahan menyeluruh pada Pasal 15</b></p>

	ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.		
	Bagian Ketujuh Pembayaran Kembali Pinjaman PEN Daerah dan Pengembalian Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI		
	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kembali atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pokok Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>b. bunga atas Pinjaman PEN Daerah, yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum berdasarkan permintaan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</li> </ol> <p>(2) Pembayaran kembali pokok Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembayaran kembali atas pokok Pinjaman PEN Daerah; dan</li> <li>b. pembayaran bunga atas Pinjaman PEN Daerah, yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum berdasarkan permintaan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</li> </ol> <p>(2) Pembayaran kembali pokok Pinjaman PEN Daerah dan pembayaran bunga atas Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.</p>	<p><b>Perubahan menyeluruh pada Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2, serta penambahan 2 ayat yaitu ayat 3 dan ayat 4</b></p>

		<p>(3) Pembayaran kembali pokok Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI.</p> <p>(4) Pembayaran bunga atas Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p>	
	BAB IV PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Program PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah		
	Bagian Kesatu Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga		
	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Menteri Keuangan memberikan Subsidi Bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar 3,05% (tiga koma nol lima persen) selama jangka waktu Pinjaman Daerah dimaksud.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat perubahan atas Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan atas Subsidi Bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam rangka pengalokasian Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam</p>		<b>TETAP</b>

	<p>Pasal 17, Menteri Keuangan selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.</p> <p>(2) KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Dalam hal KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.</p> <p>(4) KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPSPM.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Anggaran belanja Subsidi Bunga atas pelaksanaan Program PEN bersumber dari APBN, APBN Perubahan, dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai perubahan postur APBN.</p>		<p><b>TETAP</b></p>



	<p>(4) Pengalokasian anggaran belanja Subsidi Bunga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.</p>		<b>TETAP</b>
	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayarkan secara 3 (tiga) bulanan dalam satu tahun anggaran sesuai tagihan dari PT SMI.</p> <p>(2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bulan April, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Januari, Februari, dan Maret;</li> <li>b. bulan Juli, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan April, Mei, dan Juni;</li> <li>c. bulan Oktober, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Juli, Agustus, dan September; dan</li> </ol>	<p>10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayarkan secara 3 (tiga) bulanan dalam satu tahun anggaran sesuai tagihan dari PT SMI.</p> <p>(2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bulan April, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Januari, Februari, dan Maret;</li> <li>b. bulan Juli, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan April, Mei, dan Juni;</li> <li>c. bulan Oktober, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Juli, Agustus, dan September; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Perubahan :</b>  <b>Pada ayat 2, perubahan klausul</b> Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran menjadi Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dengan tembusan</p>

	<p>d. minggu pertama bulan Desember, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Oktober, November, dan Desember.</p> <p>(3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rincian perhitungan Subsidi Bunga, bukti pencairan dana Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, dan dokumen pendukung lainnya.</p> <p>(4) <b>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian</b> terhadap tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>d. minggu pertama bulan Desember, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Oktober, November, dan Desember.</p> <p>(3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rincian perhitungan Subsidi Bunga, bukti pencairan dana Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, dan dokumen pendukung lainnya.</p> <p>(4) <b>KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah melakukan penelahaan</b> terhadap tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran</p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>Perubahan :</b> <b>Pada ayat 4 perubahan klausul</b> <b>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian menjadi KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah melakukan penelahaan</b></p>
	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan tagihan beserta lampirannya dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 21</p> <p><b>(1) Berdasarkan tagihan dan hasil penelahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM.</b></p>	<p><b>Perubahan :</b> <b>Penyederhanaan Pasal 21 menjadi 5 ayat dari semula 6 ayat.</b></p>

	<p>(2) Berdasarkan tagihan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM.</p> <p>(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>(4) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pengujian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D.</p> <p>(5) Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>(6) Jadwal pembayaran Subsidi Bunga untuk tagihan Bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman</p>	<p>(2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>(3) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengujian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D.</p> <p>(4) Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>(5) Jadwal pembayaran Subsidi Bunga untuk tagihan Bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.</p>	
--	---	---	--

	<p>pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.</p>		
		<p>12. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua pada BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu A dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A sehingga Bagian Kesatu A dan Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Kesatu A Pengusulan dan Penilaian Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN</p> <p><b>Pasal 21A</b></p> <p>(1) Kepala Daerah dapat mengajukan surat permohonan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN kepada Direktur Utama PT SMI dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, yang paling sedikit mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. besaran Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN;</li> <li>b. jangka waktu Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN; dan</li> <li>c. penggunaan dana Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan mengenai prosedur kelengkapan permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (6), berlaku secara mutatis</p>	<p><b>Penambahan Pasal 21A dengan 3 ayat</b></p>

		<p>mutandis terhadap Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).</p> <p>(3) Penilaian atas permohonan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pf SMI.</p>	
	<p>Bagian Kedua Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN</p>		
	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pembayaran kembali pokok dan bungayang telahjatuh tempo oleh Pemerintah Daerah atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT SMI.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran kembali pokok dan bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dilakukan pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum.</p> <p>(3) Dalam rangka pemotongan Dana Transfer Umum untuk pembayaran</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>

	<p>kembali tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT SMI menyampaikan surat permohonan pemotongan yang dilampiri dengan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung.</p> <p>(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemotongan Dana Transfer Umum.</p> <p>(6) Dana hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicatat menggunakan akun Penerimaan Nonanggaran.</p> <p>(7) Penerimaan Nonanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan komponen penerimaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagai bagian dari pembayaran tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN kepada PT SMI.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
--	---	--	---

	<p>(8) Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.</p> <p>(9) Berdasarkan pemotongan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT SMI.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	BABV PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN		
	Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi		
	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan secara semesteran kepada Menteri Keuangan.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan</p>		



	<b>BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN</b>		
	<p><b>Pasal 25</b> Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.</p>		<b>TETAP</b>
	<p><b>Pasal 26</b> (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p> <p>(2) PT SMI bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p>		<p><b>TETAP</b></p> <p><b>TETAP</b></p>
	<p><b>Pasal 27</b> (1) Dokumen dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah: a. format Paket Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;</p>	<p>13. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 27 mengenai format surat permohonan Pinjaman PEN Daerah dan format surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Lampiran diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 27</b> Dokumen dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah: a. format Paket Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a; b. format surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);</p>	

	<p>b. format surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1);</p> <p>c. format surat pernyataan kesediaan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan</p> <p>d. format surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);  menggunakan format sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>c. format surat pernyataan kesediaan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan</p> <p>d. format surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5),  tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Pasal II	
	<p>Pasal 28</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	<p>1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pemrosesan surat permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang telah diajukan oleh PT SMI kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pencairan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	

		Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	
	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2020</p> <p>MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">SRI MULYANI INDRAWATI</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2020</p> <p>MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">SRI MULYANI INDRAWATI</p>	
	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">WIDODO EKATJAHJANA</p> <p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 880</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2020</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">WIDODO EKATJAHJANA</p> <p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1307</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b</p>	

	<p>Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian</p> <p>ANDRIANSYAH NIP 19730213 199703 1 001</p>	<p>Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian</p> <p>ANDRIANSYAH NIP 19730213 199703 1 001</p>	
	<p>LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH</p>	<p>LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK.07/2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH</p>	

A. FORMAT PAKET KEBIJAKAN

PAKET KEBIJAKAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
(ISI JUDUL PROGRAM)

No.	Sasaran Kebijakan Program	Dampak/Hasil Kebijakan	Keluaran	Indikator Pencapaian Dana	Bobot Terhadap Nilai Pinjaman	Tanggal Pencapaian
	[Berisi tujuan dan arah kebijakan yang akan dituju]	[Berisi dampak atau hasil kebijakan yang mendukung tujuan dan arah kebijakan secara umum]	[Berisi keluaran kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan]	[Indikator atau bukti dokumen yang dijanjikan]	[bobot masing-masing indikator terhadap nilai pinjaman yang akan dicairkan]	[tanggal pencapaian target indikator yang dijanjikan]

A. FORMAT PAKET KEBIJAKAN

PAKET KEBIJAKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
(ISI JUDUL PROGRAM)

No.	Sasaran Kebijakan Program	Dampak/Hasil Kebijakan	Keluaran	Indikator Pencapaian Dana	Bobot Terhadap Nilai Pinjaman	Tanggal Pencapaian
	[Berisi tujuan dan arah kebijakan yang akan dituju]	[Berisi dampak atau hasil kebijakan yang mendukung tujuan dan arah kebijakan secara umum]	[Berisi keluaran kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan]	[Indikator atau bukti dokumen yang dijanjikan]	[bobot masing-masing indikator terhadap nilai pinjaman yang akan dicairkan]	[tanggal pencapaian target indikator yang dijanjikan]

**TETAP**

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH

KOP SURAT  
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor : (tempat dan tanggal)  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Jakarta

Sehubungan dengan Pinjaman PEN Daerah yang disampaikan Menteri Keuangan melalui surat No ..... tanggal ..... hal ....., dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Komitmen Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan Paket Kebijakan Provinsi/Kabupaten/Kota ..... untuk mendukung Program PEN;
2. Surat Pernyataan Kesiapan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk Membayar Kembali Kewajiban Pinjaman PEN Daerah yang Diperhitungkan Langsung dari Penyaluran Dana Transfer Umum;
3. Paket Kebijakan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ..... dalam kurun waktu ... tahun; dan [untuk usulan pinjaman program]
4. Kerangka Acuan Kegiatan [untuk usulan pinjaman kegiatan]

Demikian usulan Pinjaman PEN Daerah ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota  
(nama Pemda)

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH

KOP SURAT  
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor : (tempat dan tanggal)  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Jakarta

Sehubungan dengan adanya PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi untuk Pemerintah Daerah serta perubahannya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah pada tahun anggaran ..... sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) dengan jangka waktu (dengan angka) (dengan huruf) tahun yang termasuk masa tenggang (dengan angka) (dengan huruf) bulan untuk Pinjaman ..... (Program dan/atau Kegiatan) yang digunakan untuk ..... (penggunaan Pinjaman PEN Daerah). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
2. Surat Komitmen Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan Paket Kebijakan Provinsi/Kabupaten/Kota ..... untuk mendukung Program PEN;
3. Surat Pernyataan Kesiapan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk Membayar Kembali Kewajiban Pinjaman PEN Daerah yang Diperhitungkan Langsung dari Penyaluran Dana Transfer Umum;
4. Paket Kebijakan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ..... dalam kurun waktu ... tahun [untuk usulan pinjaman program]; dan/atau
5. Kerangka Acuan Kegiatan [untuk usulan pinjaman kegiatan]

Demikian usulan Pinjaman PEN Daerah ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota  
(nama Pemda)

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur.

**TETAP**

**Perubahan :**

1. Penambahan penjelasan yang awalnya ... dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) menjadi dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) dengan jangka waktu (dengan angka) (dengan huruf) bulan untuk pinjaman ... (Program dan/atau Kegiatan) yang digunakan untuk ... (penggunaan Pinjaman PEN Daerah)

Penambahan lampiran dokumen nomor 1 berupa Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah

**TETAP**

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBAN PINJAMAN PEN DAERAH YANG DIPERHITUNGGAN LANGSUNG DARI PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM

KOP SURAT  
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR .....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, kami selaku Gubernur/Bupati/Wali Kota .... menyatakan kesediaan untuk membayar kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah yang diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil) daerah kami sesuai kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Daerah dan PT SMI.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

tempat dan tanggal  
Gubernur/Bupati/Wali Kota  
Provinsi/Kabupaten/Kota ....

Materai  
6000

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBAN PINJAMAN PEN DAERAH YANG DIPERHITUNGGAN LANGSUNG DARI PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM

KOP SURAT  
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR .....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, kami selaku Gubernur/Bupati/Wali Kota .... menyatakan kesediaan untuk membayar kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah yang diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil) daerah kami sesuai kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Daerah dan PT SMI.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

tempat dan tanggal  
Gubernur/Bupati/Wali Kota  
Provinsi/Kabupaten/Kota ....

Materai

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPALA DAERAH KEPADA PIMPINAN DPRD TERKAIT PERMOHONAN PINJAMAN PEN DAERAH

KOP SURAT  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Nomor : (tempat dan tanggal)  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Provinsi/Kabupaten/Kota....  
di ....

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Pemerintah telah memberikan alternatif pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah. Untuk memanfaatkan pembiayaan tersebut, kami telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) dengan jangka waktu pinjaman selama (dengan angka) (dengan huruf) tahun.

Pinjaman PEN Daerah tersebut digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang tidak bisa dipenuhi dari pendapatan daerah. Pengembalian pinjaman akan dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung (pematangan) dalam penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil). Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tersebut selanjutnya akan kami tuangkan dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran ....

Demikian surat pemberitahuan permohonan Pinjaman PEN Daerah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... kami ucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota (nama Pemda)

(Nama Kepala Daerah)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Pit. Kepala Bagian Administrasi Kementerian  
  
ANDRIASYAH  
NIP. 760213 199703 1 001



D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPALA DAERAH KEPADA PIMPINAN DPRD TERKAIT PERMOHONAN PINJAMAN PEN DAERAH

KOP SURAT  
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor : (tempat dan tanggal)  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Provinsi/Kabupaten/Kota....  
di ....

Dalam rangka Program PEN sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Pemerintah telah memberikan alternatif pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah. Untuk memanfaatkan pembiayaan tersebut, kami telah mengajukan pinjaman kepada Pemerintah melalui PT SMI sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) dengan jangka waktu pinjaman selama (dengan angka) (dengan huruf) tahun.

Pinjaman PEN Daerah tersebut digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang tidak bisa dipenuhi dari pendapatan daerah. Pengembalian pinjaman akan dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil).

Pelaksanaan dan pembayaran kewajiban Pinjaman PEN Daerah tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

Demikian surat pemberitahuan Pinjaman PEN Daerah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... kami ucapkan terima kasih.

Gubernur /Bupati/Wali Kota  
(nama Pemda)

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Pit. Kepala Bagian Administrasi Kementerian  
  
ANDRIASYAH  
NIP. 760213 199703 1 001



**Perubahan :**  
**Penambahan penjelasan**  
Pelaksanaan dan  
pembayaran kewajiban  
Pinjaman PEN Daerah  
tersebut selanjutnya akan  
dianggarkan dalam  
Anggaran Pendapatan  
Belanja Daeah (APBD)/  
Perubahan APBD dan  
dituangkan dalam laporan  
pertanggungjawaban  
APBD sampai dengan  
berakhirnya kewajiban  
pinjaman.